

Pengembangan Pariwisata Alternatif
Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya di Kabupaten Buleleng

Oleh

Nyoman Dini Andiani

Ni Made Ary Widiastini

Abstract

This paper aims to describe a form of an alternative tourism based on the needs and social capital culture owned by the community. Observation techniques and in-depth interviews conducted to determine the needs and capital owned by local people whose lands are developed as a regional tourism. The findings were analyzed using qualitative descriptive analysis method, which is then presented as a narrative. The findings in the field, it is understood that the social capital of culture is very much contained in Buleleng Regency society which can certainly synergized with tourism development. Social and cultural capital is owned by the people of Buleleng can be seen from a wide variety of both sacred art form and can be used as a form of entertainment, especially the unique temple multicultural atmosphere, historical relics including literary works of the kingdom of Buleleng and beautiful nature, especially the underwater world. The amount of social capital and the culture of Buleleng, including the community, but in the context of regional tourism is not developed optimally. Therefore in this study, with the understanding of human resources, social resources, and cultural resources possessed by the people in the district of Buleleng, required a special education that is based on the needs of society as well as the understanding of the capital-owned capital that positive impact can be felt more many by all parties, especially the people than the negative effects that occur in other tourist areas in Bali. In this case, the government is also obliged to accommodate the interests and needs of local communities in order to synergy between the needs of the community with programs implemented so that the common goal of improving the quality of tourism and social welfare can be achieved.

Keywords: social capital of culture, education, tourism

Pendahuluan

Pariwisata alternatif merupakan sebuah solusi di dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dari pengembangan pariwisata massa (*mass tourism*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moscardo dalam Christou (2012) sebagai berikut.

“Alternative tourism crew rapidly and out of the need to remedy mass tourism’s negatively impact on the environment and society, which could affect the attractiveness of a given destination from a long term prospective (Moscardo dalam Christou, 2012)”.

Pariwisata alternative sebagaimana yang dijelaskan oleh Moscardo merupakan suatu bentuk pariwisata yang bertujuan untuk memperbaiki dampak negatif yang terjadi pada lingkungan dan masyarakat sebagai akibat dari adanya pengembangan pariwisata massal. Melalui pengembangan pariwisata alternatif diharapkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dikelola dengan baik dan optimal sehingga dapat memberi manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi generasi berikutnya.

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah keberadaan Kabupaten Buleleng yang terletak di daerah Utara pulau Bali yang memiliki banyak potensi baik alam maupun budaya yang dapat dimanfaatkan, dikelola dan dikemas menjadi daya tarik wisata. Menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi di daerah Selatan pulau Bali yang terjadi sebagai akibat dari adanya pengembangan pariwisata massal, maka seyogyanya jenis kepariwisataan yang dikembangkan

di Kabupaten Buleleng adalah pariwisata alternatif, baik itu dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Memahami banyaknya kebudayaan unik dan khas yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buleleng, maka pengembangan pariwisata alternatif melalui pemanfaatan sumber daya budaya merupakan solusi untuk menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai daerah tujuan wisata yang berbeda dengan daerah tujuan wisata lainnya di Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa jenis kepariwisataan yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Adapun penjelasan tentang pariwisata budaya yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah sebagai berikut.

“Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan (Perda Bali Nomor 2 Tahun 2012, Bab I, Pasal 1, Poin 14)”.

Memahami isi yang terdapat dalam Perda Bali nomor 2 Tahun 2012, maka secara implisit

pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Buleleng akan mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintahan di tingkat provinsi. Pengembangan pariwisata alternatif melalui pemanfaatan potensi budaya di Kabupaten Buleleng menarik untuk dicermati dan diterapkan, mengingat selain memiliki banyak sumber daya budaya, Kabupaten Buleleng yang jaraknya sangat jauh dari pintu masuk utama yakni Bandara Ngurah Rai harus mampu mengembangkan pariwisata yang unik serta berbeda dari pariwisata yang ada di daerah tujuan wisata lainnya sehingga hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan menginap di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu di gali lebih lanjut upaya pengkemasan berbagai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Buleleng, menjadi suatu produk wisata alternative yang berpihak pada kesejahteraan

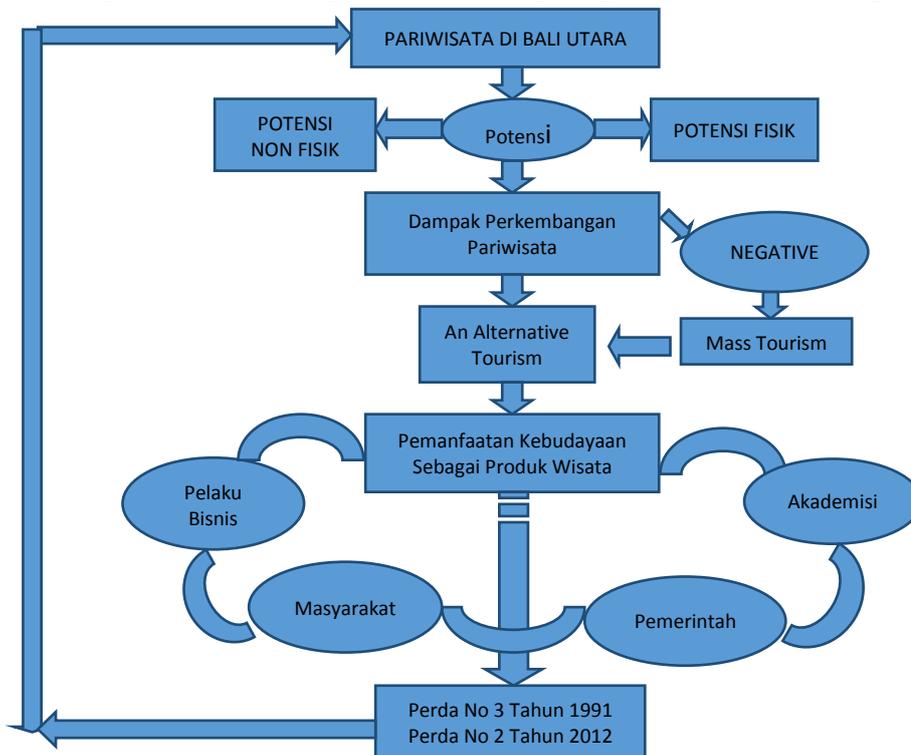
masyarakat lokalnya, serta memberikan manfaat edukasi pula terhadap para wisatawannya, karena dengan sinergi yang baik, produk wisata yang ditawarkan tersebut bisa berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang merupakan sebuah pendekatan kulturalis dan penekanannya pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan mengingat kebudayaan berasal dari masyarakat dan dipertahankan serta diterapkan oleh masyarakat.

Data di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Selain itu dilakukan studi pustaka terhadap buku, penelitian terdahulu serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil pengolahan data yang dilakukan secara deskriptip kualitatif dipaparkan secara naratif.

Adapun latar belakang maksud dan tujuan penelitian ini tertuang bagan 1.



Dalam bagan 1 tersebut dapat di ketahui bahwa potensi Bali utara baik potensi fisik maupun potensi non fisiknya berpeluang besar untuk dikembangkan ke dalam bentuk pariwisata alternative, pariwisata alternative ini menjadi pilihan yang terbaik, guna menanggulangi berbagai dampak negative dari pariwisata massal atau *mass tourism*. Pariwisata alternative yang dimaksud dalam pengembangan pariwisata Buleleng adalah pengembangan paket wisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya budaya yang beragam yang dimilikiny dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 2 Tahun 2012 serta dengan adanya sinergisitas dari empat pilar utama yaitu, pihak akademisi, pemerintah, pihak swasta dan tentunya masyarakat local, dengan tujuan tercapainya suatu paket wisata yang mampu menguntungkan masyarakat local dan berkelanjutan, serta memberikan kepuasan bagi wisatawan minat khusus yang berkunjung nantinya.

Konsep Pariwisata Alternatif

Pariwisata alternatif sebagai pengembangan pariwisata yang bertolak belakang dengan pariwisata

massal memiliki banyak perbedaan yang mana pariwisata alternatif dianggap dan diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi dan memperbaiki dampak negatif yang dihasilkan dari pariwisata massal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Smith dan Eadington dalam Christou, 2012 sebagai berikut.

“The birth of alternative tourism was due to high criticism for mass tourism and its negative effects on destination areas. Alternative tourism incorporated soft tourism, small-scale tourism, green tourism, nature tourism and integrated tourism. Alternative tourism was used as a hope for proving consistency with natural, social and community values, as alternative tourism could have less negative effects on destination areas, environment and population without diminishing positive economic effects (Smith and Eadington dalam Christou, 2012)”.

Perbedaan pada pariwisata massal (*mass tourism*) dan pariwisata alternatif (*Alternative tourism*) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.
Mass Tourism Vs Alternatif Tourism

	Mass Tourism	Alternative Tourism
General Features	Rapid development	Slow development
	Maximizes	Optimizes
	Socially, environmentally, inconsiderate, aggressive	Socially, environmentally, considerate, cautions
	Short term	Long term
	Remote control	Local control
	Unstable	Stable
	Price consciousness	Value consciousness
Tourist behavior	Quantitative	Qualitative

Growth	Development
Peak holiday periods, seasonal	Staggered holiday periods, no necessarily seasonal
Capacity for high seasonal demand	Staggered holiday periods, no necessarily seasonal
Tourism development everywhere	Development only in suitable places
Large groups	Single, families, small groups
Fixed program	Tourists directed
Spontaneous decisions	Tourist decide
Comfortable and passive	Demanding and active

Sumber: Gartner dalam Christou, 2012

Berdasarkan tabel 1 tentang perbedaan pada bentuk serta tipe wisatawan yang terdapat pada pariwisata massal dan pariwisata alternative dapat dilihat dengan jelas bahwa pariwisata alternative sangat memperhatikan kondisi daerah tujuan wisata. Pada konteks ini pariwisata alternative merupakan sebuah kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan secara perlahan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat dipengaruhi oleh adanya pengembangan pariwisata tersebut. Pariwisata alternative sangat menekankan kualitas, yang tentunya berbeda dengan pariwisata massal yang mengutamakan kuantitas. Keberlanjutan pariwisata untuk generasi berikutnya sangat diperhatikan di dalam pengembangan pariwisata alternatif, sehingga Kabupaten Buleleng sangat tepat jika bentuk kepariwisataan yang dikembangkan adalah pariwisata alternatif yang dalam hal ini memanfaatkan sumber daya budaya secara optimal, bukan maksimal.

Gambaran Umum Kabupaten Buleleng

Pengembangan Pariwisata Alternatif di Kabupaten Buleleng

Berbasis Sumber Daya Budaya Masyarakat

Kebudayaan yang dimaksud pada tulisan ini bukanlah hanya sebagai sebuah benda, melainkan lebih dari itu kebudayaan adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan bersifat cair serta memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan termasuk pariwisata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robinson dan Picard (2006) tentang kebudayaan sebagai berikut.

“Culture is a fluid and problematic concept to deal with. In this context it is summarily taken to mean both ‘ways of life’ (beliefs, values, social practices, rituals, and traditions etc.) and the tangible (building, monuments, objects etc.) and the intangible (language, performances and festivals, craftsmanship etc.) expressions and manifestations of society’s values and beliefs. In a tourist sense, culture refers to both ‘peoples’ and their ordinary social characteristics, traditions and day to day patterns of behavior which mark them out as ‘different’, as well as to more exceptional

representations of creative and artistic endeavor (Robinson dan Picard, 2006)”.

Kebudayaan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, menyebabkan pengembangan pariwisata budaya yang dimaksud dalam Perda Bali nomor 2 Tahun 2012 secara implisit mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam kepariwisataan. Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud oleh Robinson dan Picard (2006) seperti kepercayaan, nilai, norma, bahasa dan lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat, maka pengembangan pariwisata alternatif berbasis sumber daya budaya di Kabupaten Buleleng harus melibatkan peranan masyarakat secara aktif.

Menyadari pentingnya masyarakat, maka perlu dilakukan pendekatan dengan memahami kondisi masyarakat serta sumber daya yang dimilikinya. Sebagaimana yang dikemukakan Adi (2012:166-167) bahwa terdapat dua metode pendekatan yang dapat diterapkan di dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat.

“(1) Pendekatan direktif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa *community worker* tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini, peranan *community worker* bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. Dalam hal ini *community worker* lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara –cara apa

yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan penganbilan keputusan berada di tangan *community worker*; (2) Pendekatan nondirektif (partisipatif) dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, *community worker* pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri untuk tujuan yang mereka inginkan (Adi, 2012: 166-167)”

Melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, diharapkan pengembangan pariwisata alternatif yang melibatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pada daerah tujuan wisata secara aktif dapat berjalan dengan baik. Selain itu, di dalam penerapannya perlu dipahami modal sosial-budaya masyarakat seperti latar belakang pendidikan, keterampilan dan adanya hubungan kuat antara masyarakat dan tokoh elit, sehingga pendekatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Kabupaten Buleleng memiliki berbagai jenis sumber daya budaya yakni sebanyak 54 daya tarik

wisata budaya yang terdiri dari 42 tempat wisata dan 12 kesenian. Adapun sumber daya budaya yang dimaksud adalah Museum Gedong Kertya, Puri Agung Singaraja, Ex Pelabuhan Buleleng, Monumen Tri Yudha Mandala, Tugu Singa Ambara Raja, Pengrajin Dulang Petandakan, Desa Naga Sepeha, Desa Jinengdalem, Desa Pengelatan, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit, Pura Dalem Jagaraga, Lingkungan Pura Meduwe Karang, Pura Subak Desa Bebetin, Pura Yeh Tabah, Pura Puncak Bukit Sinunggal, Goa Bunda Maria, Pura Penegil Dharma, Pura Bukit Dulang, Pura Ponjok Batu, Desa Tua Sembiran, Made Art Studio, Pembuatan Ingka Sambirenteng, Gula Aren Sambirenteng, Desa Tejakula, Kerajinan Pelepah Pisang Desa Ambengan, Monumen Triyudha Sakti, Pengrajin Perak Tirta Prapen, Pura Pejenengan Kibarak Panji Sakti, Pura Bhuana Kerta, Brahma Wihara Arama Banjar, Kerajinan Bambu Tigawasa, Desa Tua Pedawa, Makam Jayaprana, Pura Menjangan, Lingkungan Pura Melanting, Lingkungan Pura Kerta Kawat, Pura Belatung, Parahyangan Betara Sakti Wawu Rauh, Pengrajin Perak dan Emas Petemon, Pengrajin Tenun Petemon, Pura Jaya Prana Kalianget, Wayang Wong, Permainan Megoak-goakan, Kesenian Genjek, Kesenian Tetabuhan, Kesenian Matembang, kesenian Gong Kebyar, kesenian Gong Angklung, Kesenian Gender, Kesenian Wayang Kulit, Kesenian Tabuh Angklung dan Kesenian Joged (Widiastini, Nyoman Dini Andiani dan Trianasari, 2012).

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat tiga sumber daya budaya yang merupakan kesenian

masyarakat Buleleng yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata yakni kesenian genjek, kesenian jogged dan permainan megoak-goakan. Mengingat ketiga kesenian tersebut bukan merupakan seni sakral, maka sangat baik untuk dimanfaatkan dan dikemas menjadi daya tarik wisata yang unik dan mencerminkan identitas dari Kabupaten Buleleng. Selain itu, tersedianya tempat yang representatif bagi pementasan kesenian-kesenian tersebut seperti Ex Pelabuhan Buleleng dan Puri Agung Singaraja maka pengemasan kesenian tersebut ke dalam calendar of event akan sangat membantu pengembangan pariwisata alternatif di Kabupaten Buleleng. Ex Pelabuhan Buleleng selain memiliki areal yang luas untuk dijadikan sebagai tempat pementasan, tempat tersebut juga memiliki sejarah sebagai pintu masuk utama yang pertama di Bali sebelum Ibukota dipindahkan ke Denpasar. Seniman asing seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet dan lainnya yang melalui kedatangannya berimplikasi terhadap perkembangan pariwisata di sendiri, *community worker* lebih bersifat Bali, menggunakan Ex Pelabuhan Buleleng sebagai pintu masuk mereka ke Bali. Sementara Puri Agung Singaraja selain memiliki sejarah yang terkait dengan kerajaan yang ada di Kabupaten Buleleng juga memiliki ruang yang representatif untuk digunakan sebagai tempat menggelar kesenian. Bahkan karya sastra yang dihasilkan oleh raja terakhir yakni Anak Agung Panji Tisna juga telah mengantarkan nama Puri Agung Buleleng hingga ke mancanegara.

Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai pariwisata alternatif

harus dilakukan secara cermat agar tujuan dari pariwisata alternatif yakni dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama dan tidak menimbulkan dampak negatif, maka pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan konsep yang ada pada pariwisata alternatif. Gagasan Butler (1992) dan Weaver (1993) dalam

(Weaver dan Lawton ,1999: 15) tentang karakteristik pariwisata alternatif dapat dijadikan acuan di dalam pengembangan pariwisata alternatif di Kabupaten Buleleng sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Karakteristik Pariwisata Alternatif

No	Characteristic	Deliberate Alternative Tourism
1	Market Segment Volume and mode Seasonality Origins	Allocentric – midcentric Low; individual arrangement No distinct seasonality No dominant market
2	Attractions Emphasis Character Orientation	Moderately commercialized Area specific, ‘authentic’ Tourist & local
3	Accommodation Size Spatial pattern Density Architecture Ownership	Small-scale Dispersed throughout area Low density Vernacular style, un-obtrusive, complementary Local, small businesses
4	Economic Status Role of tourism Linkages Leakages Multiplier effect	Complements existing activity Mainly internal Minimal High
5	Regulation Control Amount Ideology emphasis Timeframe	Local ‘community’ Extensive; to minimize local negative impacts Public intervention, community stability & well-being, integrated, holistic Long-term

Sumber: Butler (1992) dan Weaver (1993) dalam (Weaver dan Lawton ,1999: 15)

Melihat karakteristik yang ada pada tabel 2 dapat dipahami bahwa peranan masyarakat sangat penting, bahkan pada regulasi, masyarakat lokal memegang kendali yakni turut serta mengawasi perkembangan pariwisata alternatif tersebut. Pada konteks ini masyarakat sebagai sistem tentu akan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada daerahnya yang dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata agar tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan pariwisata tersebut dapat bermanfaat baik pada generasi saat kegiatan kepariwisataan dilakukan maupun untuk generasi berikutnya. Begitupula pariwisata sebagai sebuah sistem dan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepariwisataan tersebut, maka pariwisata dan masyarakat harus memiliki misi dan visi yang sama.

Meminjam gagasan Ritzer dalam Wirawan (2012: 55), terdapat ciri sistem, yaitu: (1) sistem cenderung mempunyai *property of order*, dan bagian-bagian saling tergantung; (2) sistem cenderung mengarah *self-maintaining order*, atau keseimbangan; (3) sistem menjadi statis; (4) ciri satu bagian sistem mempunyai dampak pada bagian-bagian lainnya; (5) alokasi dan integrasi dua proses fundamental adalah *given-state* dari sistem keseimbangan; (6) sistem cenderung memelihara diri dan cenderung mengubah sistem dari dalam. Memahami ciri-ciri sistem yang dikemukakan Ritzer dalam Wirawan (2012: 55), maka pariwisata dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang sulit dipisahkan harus mampu bersinergi dengan baik untuk menghasilkan manfaat yang baik bagi

semua pihak yang terlibat di dalam kepariwisataan tersebut. Namun, berdasarkan temuan di lapangan kondisi masyarakat cenderung kurang mampu beradaptasi dengan baik yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan masyarakat kurang mampu mengelola sumber dayanya menjadi daya tarik wisata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodley dalam Ardika (2015: 12) terkait kelemahan masyarakat sebagai berikut.

“Masyarakat lokal memiliki sejumlah kendala dalam pengembangan kepariwisataan antara lain: (1) Masyarakat lokal sering kurang bahkan tidak mempunyai visi atau pemahaman tentang pengembangan pariwisata. (2) rendahnya minat (*interest*) dan kesadaran masyarakat lokal terhadap kepariwisataan, karena hal itu dianggap sesuatu yang berasal dari luar kebudayaan mereka. (3) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat lokal umumnya terbatas di bidang kepariwisataan. (4) Kesenjangan budaya (*cultural barrier*) antara masyarakat lokal dengan wisatawan yang sering berbeda satu dengan lainnya. (5) Faktor ekonomi dan investasi yang sangat menentukan dalam pengembangan industri pariwisata sering tidak dimiliki oleh masyarakat lokal (Woodley, dalam Ardika, 2015: 12)”.

Memiliki berbagai kelemahan, maka masyarakat harus diberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka

mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang dibawa oleh kepariwisataan tersebut. Secara evolutif, Greenwood dalam Pitana (2005: 83) menjelaskan bahwa hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komoditisasi dan komersialisasi, sehingga sebelum suatu tempat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata perlu dipahami kemampuan adaptasi masyarakat baik terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan maupun politik. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar proses pengembangan pariwisata alternatif, khususnya yang memanfaatkan sumber daya budaya sebagai daya tarik wisata dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi terhadap kebudayaan masyarakat yang bersifat sakral seperti tari sakral atau suatu upacara di pura yang memiliki nilai tertentu. Hal ini penting dilakukan mengingat kebudayaan yang sifatnya sakral tersebut sesungguhnya dapat menjadikan Bali termasuk Kabupaten Buleleng memiliki waktu kunjungan wisatawan yang berbeda dengan pariwisata di tempat lain, yakni disesuaikan dengan waktu kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Bali.

Pada penerapannya agar pengembangan pariwisata alternatif di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan sumber daya budaya dapat terlaksana dengan baik ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya: (1) Memahami jenis kebudayaan yang bersifat sakral dan profan. Hal ini penting dilakukan agar kesenian yang sakral dapat dipertahankan kesakralannya sebagai akibat dari permintaan wisatawan

maupun biro perjalanan wisata, melainkan masyarakatlah yang mengatur waktu kunjung wisatawan yang disertai dengan aturan yang ada dalam norma masyarakat baik lisan maupun tertulis; (2) Membuat jadwal kegiatan pementasan kebudayaan yang dapat ditawarkan setahun sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan (*calendar of event*), sehingga wisatawan dapat mengatur waktunya untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan melihat dan mengetahui kebudayaan yang dimiliki oleh tempat tersebut; (3) Mempromosikan Kabupaten Pariwisata dengan memanfaatkan kesenian daerah sebagai ikon seperti tarian *meogoak-goakan* yang merupakan jenis tari khas Kabupaten Buleleng yang memiliki nilai kebersamaan. Melalui pengemasan kesenian yang unik dan tidak bersifat sakral diharapkan Kabupaten Buleleng dapat dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang unik dan berbeda dengan daerah tujuan wisata lainnya, sehingga patut untuk dikunjungi oleh semua wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Implikasi Pemanfaatan Kebudayaan Sebagai Produk Wisata

Menjadikan kebudayaan sebagai produk wisata tentu memiliki implikasi baik yang bersifat positif maupun negatif. Agar implikasi negatif dapat diminimalisir, maka perlu adanya sistem kontrol di setiap tahapan pengembangan pariwisata baik itu melibatkan pemerintah, pelaku bisnis masyarakat, tokoh masyarakat maupun akademisi. Untuk itu di dalam pengembangan pariwisata seyogyanya terdapat empat pilar penting yang wajib berperan aktif serta

bertanggungjawab terhadap kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan yakni: (1) pemerintah berperan sebagai regulator yang tegas, (2) pelaku bisnis pariwisata berperan sebagai penanam modal yang arif dan bijaksana, (3) masyarakat berperan sebagai tuan rumah yang baik dan ramah, dan (4) lembaga pendidikan/akademisi berperan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat agar mampu berperan sebagai pelaku layanan pariwisata yang profesional.

Implikasi di setiap pengembangan pariwisata termasuk di dalam pariwisata alternatif dapat terjadi pada aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik. Pariwisata sebagai industri yang multipeluang tentu akan berdampak pada munculnya berbagai usaha yang terkait dengan kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum implikasi ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pariwisata adalah terhadap penerimaan devisa, kesempatan kerja, pembangunan dan pendapatan pemerintah (Cohen, 1984). Implikasi pariwisata terhadap aspek ekonomi cenderung bersifat positif, meskipun sering terjadi ketidakmerataan bagi yang memiliki modal kapital besar dengan yang bermodal kecil. Meminjam gagasan Plummer (2011: 229) mengemukakan bahwa terdapat tujuh modal sumber daya di dalam statifikasi kehidupan yaitu: (1) sumber daya ekonomi, (2) sumber daya sosial, (3) sumber daya budaya, (4) sumber daya simbolik, (5) sumber daya politik, (6) sumber daya tubuh dan emosional, (7) sumber daya pribadi atau kekhususan yang dimiliki oleh

seseorang baik itu pengetahuan, keterampilan maupun kemampuannya. Ketujuh modal tersebut sangat berperan penting di dalam memosisikan pekerjaan seseorang di dalam kepariwisataan. Semakin banyak dan kuat modal-modal yang dimilikinya, maka semakin bagus posisi pekerjaan mereka, dan berimplikasi pula terhadap ekonomi yang di dapat.

Pariwisata sebagai sebuah industri atau sistem yang kompleks tentu dapat berimplikasi terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, kondisi lingkungan yang digunakan sebagai areal untuk pengembangan pariwisata serta perpolitikan di suatu daerah tujuan wisata sebagai bentuk perebutan ruang makna. Adalah sesuatu yang dilematis ketika pariwisata dibangun dan dikembangkan di suatu daerah, secara ekonomi dapat memberikan implikasi positif, namun dapat pula berimplikasi negatif terhadap aspek sosial dan budaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Greenwood dalam Pitana dan Gayatri (2005: 134) bahwa pariwisata mempunyai dampak yang sangat besar terhadap mobilitas vertikal. Perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata menyebabkan tumbuhnya kelas-kelas menengah baru, yang senantiasa ada dalam situasi kompetisi dengan kelas menengah yang telah ada sebelumnya. Sementara de Kadt dalam Pitana dan Gayatri (2005: 134) menekankan bahwa dengan adanya pariwisata stratifikasi sosial yang semula berdasarkan atas nilai-nilai lama, seperti kelahiran atau darah, beralih kepada dasar stratifikasi yang baru,

yang lebih mengutamakan aspek ekonomi.

Pariwisata yang lebih dipandang sebagai datangnya keuntungan berupa uang menyebabkan semua pihak yang terlibat di dalamnya melakukan perbutan ruang makna baik secara ekonomi, sosial-budaya, lingkungan maupun politik. Terbentuknya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari adanya pariwisata disebabkan karena gaya hidup orang yang ingin menunjukkan status serta identitas dirinya di dalam masyarakat yang tentunya dibedakan berdasarkan kemapanannya serta pekerjaan yang ditekuninya. Pada aspek sosial-budaya, dikembangkannya pariwisata pada suatu daerah seringkali menyebabkan terjadinya komoditisasi dan komersialisasi terhadap kebudayaan masyarakat. Pemikiran yang selalu mengutamakan kepentingan wisatawan dan menganggapnya tamu yang agung menyebabkan masyarakat rela kebudayaannya dikomersialisasikan. Sebagai contoh tari Barong dan tari Sanghyang yang sesungguhnya sebuah tarian yang sakral kini telah dipentaskan di tempat yang tidak sepatutnya hanya untuk memenuhi keinginan wisatawan. Fenomena tersebut tentu akan menggerus nilai-nilai kebudayaan masyarakat, sehingga wisatawan menganggap masyarakat sangat mudah untuk dibeli. Berdasarkan fenomena tersebut, seyogyanya pengembangan pariwisata harus memperhatikan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga sebelum pengembangan pariwisata di lakukan pada suatu daerah masyarakat harus diberikan

arahan dengan berbagai pendekatan agar hal-hal yang sifatnya sakral tidak dikelola secara profan. Pada konteks ini, tentu pemerintah harus tegas mengimplementasikan prinsip pariwisata budaya yang secara implisit seharusnya menjaga nilai-nilai kebudayaan- bukan menggerusnya dengan menjadikannya produk wisata yang bersifat profan.

Pengembangan pariwisata di Bali secara implisit sesungguhnya telah melindungi kebudayaan sebagaimana yang tercantum pada Perda Nomr 3 Tahun 1991, Pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-noram dan nilai-nilai kebudayaan agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan (Ardika, 2003: 21). Perda ini seharusnya dipertahankan terus baik secara implisit maupun eksplisit agar pemertahanan terhadap nilai-nilai kebudayaan Bali dapat dilaksanakan. Meskipun pada Perda terbaru yakni Perda no. 2 Tahun 2012 pada pasal 3 diganti menjadi tujuan kepariwisataan budaya Bali bertujuan untuk (1) melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai AgamaHindu, (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) menciptakan kesempatan berusaha, (4) menciptakan lapangan kerja, (5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, (6) mengangkat citra

bangsa, (7)memperkokuh rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa, dan (8) memepererat persahabatan antarbangsa, pada penerapannya pemertahanan kebudayaan tetap harus dilakukan mengingat Bali tidak lebih dari museum hidup karena kebudayaannya ada di kesehariannya masyarakat.

Penutup Pariwisata alternatif yang memiliki visi dan misi untuk membenahi pariwisata model massal yang telah memberikan dampak terhadap terjadinya kerusakan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seharusnya diimplementasikan dengan baik oleh pilar-pilar kepariwisataan yakni pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, masyarakat dan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah yang pada Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 mengesakan bahwa kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu harus dilestarikan, maka seyogyanya pelaku pariwisata tidak saja melestarikan namun juga mempertahankan hal-hal yang bersifat sakral. Melalui pengembangan pariwisata alternatif yang berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada tabel 1 dan tabel 2, sesungguhnya mampu memberikan perlindungan terhadap kebudayaan masyarakat karena selain pengembangnya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada di dalamnya, pariwisata alternatif merupakan jenis pariwisata yang menggali dan mengelola potensi secara optimal-bukan maksimal. Sehingga dengan menggunakan jenis pariwisata alternatif, pariwisata di Kabupaten Buleleng dapat berkembang dengan

baik dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardika, I Wayan. 2003. "Pariwisata Bali: Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata. Dalam *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Nyoman Dharma Putra (ed). Denpasar: Pustaka Bali Post.
- _____. 2015. *Warisan Budaya Perspektif Masa Kini*. Denpasar: Udayana University Press.
- Pitana, Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Plummer, Ken. 2011. *Sosilogi The Basic*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Christous, Loizos. 2012. *Is it Possible to Combine Mass Tourism with Alternative Forms of Tourism: The Case of Spain, Greece, Slovenia and Croatia*. Journal of Business Administration Online-Spring.
- Cohen, Erik. 1984. *The Sosiology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings*. Annal of Tourism Research 30: 236-266.
- Weaver, David dan Lawton, Laura. 1999. *Sustainable Tourism: a Critical Analysis*. Coopertaive

Research Center for Sustainable
Tourism. Research Report
Series. CRC for Sustainable
Tourism Pty Ltd.

Widiastini, Ni Made. Nyoman Dini
Andiani. Trianasari. 2012.
*Pengembangan Model
Pemasaran Pariwisata di
Kabupaten Buleleng*. Laporan
Penelitian. Universitas
Pendidikan Ganesha: Lembaga
Penelitian.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial
Dalam Tiga Paradigma
Fakta Sosial, Definisi
Sosial dan Perilaku Sosial*.
Jakarta: Kencana